



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. ANDI M. AKIL
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 3376

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

1.097.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. Tanah Seluas 1200 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/157 m2 di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

391.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

53.150.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

920.469.694



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.461.619.694
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.461.619.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.